

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Amiruddin, Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sugono, 2006, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ibrahim, Johny, 2007, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang.
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Transparency International Indonesia, Jakarta 2003
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Kimberly Ann Elliot, *Corruption and The Global Economy*, terjemahan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Edisi Pertama, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mangesti, Yovita, Tanya, Bernard L., 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1999
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Taufik Rinaldi, “memerangi korupsi di Indonesia yang terdesentralisasi, studi kasus penanganan korupsi pemerintahan daerah” Hasil Penelitian Local Government Corruption Study (LGCS) tahun 2007
- Tanya, Bernard L, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 11.
- Nicken Sarwo Rini, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Abuse of Administrative Powers in Corruption Crime Laws)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18 No. 2, Juni 2018.
- W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, 1994, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan ( Susunan II )*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

**b. Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001

- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan.
- Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Jo. Perpres Nomor 58 Tahun 2017
- Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PERJA039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

**c. Internet/Website**

- Shvoong, Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana, diakses melalui <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/> tanggal 21 Agustus 2019
- Alfin Sulaeman, 2016, Pihak Yang Berwenang Menilai Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi, <http://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 2 September 2019
- B. Semedi W.I., Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum, Pusdiklat Bea dan Cukai, Edisi Desember 2013, diakses dalam <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>, pada tanggal 1 Maret 2018, jam : 15.34 WIB.
- Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) “Peranan Inspektorat Dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli” diakses melalui <http://www.bpkp.go.id/> pada tanggal 2 September 2019
- Lia Hutasoit,” KPK Sudah Tangkap 100 Kepala Daerah, Ini Daftar Lengkapnya” diakses lewat <https://www.idntimes.com>, pada tanggal 16 Agustus 2019

